

KEPIMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT FATIMA MERNISSI

Munawwarah¹ Sabri Samin² Andi Tenri Padang³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: munawarahnaurah3@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this research is how women's leadership is according to Fatima Mernissi from the perspective of Islamic law. The problem in this research is that the existence of women in the political field is being heard again, namely the increasing interest of women in the world of politics. Unfortunately, our country, Indonesia, places women only as second persons. Judging from history, women are often seen as powerless, there is a saying in society that women cannot go to higher education, because their work seems to only be in the well, kitchen and bed. The type of research used in this research is research with a library approach, namely research that is purely library in nature where the data is based on or taken from written materials, whether in the form of books, previous theses, journals or other things related to the topic or theme. Discussion according to the title of this research. The results of this research show that there are women in the world of politics who act as leaders, not to overthrow, demote, or seize power from men. But as equal partners for women and men. At a time when several clerics opposed women's leadership in the world of politics, Fatima Mernissi as a figure in Islamic feminism thought that a woman could become a leader in the world of politics. Fatima Mernissi strongly opposes the patriarchal culture that exists in society. Because in his view, what has existed in the patriarchal system, namely injustice, discrimination, exclusion and domestication of women, is only the interpretation of scholars who are said to have authority in interpreting religious texts. Indirectly, the existing patriarchal culture is the reason for the low number of seats for women in politics. According to him, women's participation in politics does not mean they want to compete or compete with men, but as a form of equal rights and justice for women because currently many women have the same abilities and knowledge as men.

Keywords: leadership, politics, women

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan perempuan menurut Fatima Mernissi dalam perspektif Hukum Islam. Permasalahan Dalam Penelitian ini yaitu Perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perempuan dalam dunia politik yang bertindak sebagai pemimpin, bukan untuk menjatuhkan, menurunkan, ataupun merebut kekuasaan dari laki-laki. Tetapi sebagai mitra kesejajaran perempuan dan laki-laki. Pada saat beberapa ulama menentang kepemimpinan perempuan dalam dunia politik, Fatima Mernissi sebagai tokoh feminisme Islam memiliki pemikiran bahwa seorang perempuan dapat menjadi pemimpin. Munawwarah, Sabri Samin, Andi Tenripadang, "Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Fatimah Mernissi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 37-47.

pada dunia politik. Menurutnya, keikutsertaan perempuan dalam politik bukan berarti ingin menyaingi atau berlomba-lomba dengan laki-laki, tetapi sebagai bentuk kesamaan hak dan nilai keadilan pada kaum perempuan karena saat ini banyak kaum perempuan yang telah memiliki kemampuan dan ilmu yang setara dengan laki-laki.

Kata Kunci: kepemimpinan, Politik, Perempuan.

PENDAHULUAN

Dalam kisah peninggalan Yunani kuno, wanita dianggap sebagai sumber kekacauan dan kejahatan di dunia. Sebelum adanya zaman penerangan kembali atau Renaissance perempuan pada abad peradaban Eropa, dijuluki sebagai sumber godaan penyeru kesenangan duniawi.¹

Dehumanisasi perempuan di dunia barat mungkin merupakan “pendamping” dehumanisasi manusia. Berbeda dengan yang terjadi di dunia Barat, perempuan hadir di seluruh dunia Timur, khususnya dunia Islam. Pada masa awal kebangkitan peradaban Islam, terjadi perubahan besar dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam, selain korupsi politik masyarakat, juga terjadi korupsi status sosial perempuan. Hal ini sering terlihat dari munculnya berbagai hadis yang secara tidak masuk akal meremehkan perempuan, padahal hadis-hadis tersebut tidak dibuktikan. Untuk melegitimasi hal ini, terlalu banyak hipotesis yang diajukan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan berada di peringkat kedua setelah laki-laki hal ini yang diucapkan oleh Ibnu Arabi, seorang sufi populer, bahwa Siti Hawa terbuat dari tulang rusuk Adam.²

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan yang diterapkan bercorak demokrasi. Meskipun partisipasi perempuan dalam politik juga kerap dipengaruhi oleh perspektif Gender. Gender merupakan isu yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghambat atau pemicu perempuan memasuki ranah politik, karena gender merupakan aspek yang menonjol antara lain seperti ras, agama, dan golongan. Tetapi terlepas dari isu-isu Gender, kemampuan seseorang membangun komunikasi politik yang baik, salah satunya dipengaruhi latar

¹Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Basil Blackwell: Oxford, 1991) h. VI

²Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* . h.12

belakang pendidikan yang dimiliki dan dijadikan tolak ukur bagi masyarakat untuk memberikan dukungan.³

Ada perempuan dalam dunia isu legislatif yang bertindak sebagai pemimpin, bukan untuk menjatuhkan, menurunkan peringkat, atau merebut kendali laki-laki. Namun seiring bertambahnya kesejajaran bagi wanita dan pria. Pada saat beberapa ulama menentang kepemimpinan perempuan dalam dunia politik, Fatima Mernissi sebagai tokoh feminisme Islam memiliki pemikiran bahwa seorang perempuan dapat menjadi pemimpin pada dunia politik. Dalam tokoh feminisme Islam Fatima Mernissi sangat terkenal, lahir di Kota Fez, Maroko. Fatima Mernissi merupakan seseorang yang sangat produktif untuk menulis. Dalam penulisan semua karya-karyanya, Fatima Mernissi menggunakan studi dan pengujian terhadap kitab-kitab kuning serta Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab, menurutnya, agama wajib dipahami secara bertahap agar dapat melihat realitas sosial dan dinamikanya.

Fatima Mernissi menemukan hal ini karena dia percaya bahwa menjauhi hal-hal yang primitif dan tidak logis adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencegah penganiayaan dan kekejaman politik. Sependapat dengannya, perpaduan antara kehinaan dan kesakralan, antara Al-Qur'an dan lamunan rasa percaya diri harus didekonstruksi sebagai figur hak-hak perempuan Islam.⁴ Fatima Mernissi sangat menentang budaya patriarki masyarakat. Sebab, menurutnya, apa yang terjadi dalam sistem patriarki, termasuk ketidakadilan, diskriminasi, pengucilan, dan domestikasi perempuan, hanyalah tafsir para ulama yang mengklaim otoritas dalam membaca kitab suci.

Secara tidak langsung, masyarakat patriarki saat ini menjadi penyebab rendahnya jumlah kursi politik bagi perempuan. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik bukan mencerminkan keinginan untuk bersaing atau bersaing dengan laki-laki, melainkan semacam cita-cita persamaan hak dan keadilan bagi perempuan, mengingat kini banyak perempuan yang mempunyai kapasitas dan informasi yang setara dengan laki-laki.

Fatima Mernissi mengkritik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mempunyai kaitan dengan wanita sebagai sandaran renungannya. Salah satu hadis yang banyak ia kritisi yakni, dalam kitab Sahih al-Bukhari, riwayat yang ikut dikritisi Fatima Mernissi tersebut adalah Abu Hurairah dan Abu Bakrah. Fatima Mernissi merasa penting untuk melihat hadis-

³ Nur Azzah Fadila, Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 3, no. 2 (2022): 386

⁴ Muhammad Rusydi, "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)," *An Nisa'a* 7, no. 2 (2012): 73–86.

hadis seksis yang dianggap mengekang dan menyudutkan perempuan, tentunya dengan melihat bagaimana hadis-hadis tersebut dideskripsikan.

Dengan mencermati permasalahan di atas, penulis akan mengkaji dorongan dalam kaitannya dengan administrasi politik perempuan, khususnya dari sudut pandang Siyash dusturiyah. Selanjutnya penulis merasa penasaran untuk mengkaji kewibawaan perempuan, dengan mengambil pertanyaan tentang “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi Perspektif Hukum Islam”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian dengan pendekatan kepustakaan (*library Research*), Sumber Data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah buku-buku Pembahasan atau judul penelitian ini sesuai dengan Fatima Mernissi. Metode Pengumpulan Data, Membaca, mempertimbangkan, dan melaporkan berbagai komposisi atau membaca bahan-bahan yang penting bagi pokok bahasan. Teknik Pengolahan data Identifikasi data, Reduksi data, Pengeditan data. Teknik Analisis Data Untuk menganalisis informasi, penyelidikan informasi yang digunakan adalah strategi induktif subjektif, sehingga informasi tersebut akan dianalisis secara khusus dan kemudian dijadikan data umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup

Fatima Mernissi adalah seorang aktivis feminis Islam yang peduli dengan kesetaraan gender. Mernissi lahir di Fez, Maroko Utara, pada 27 September 1940. Kota ini berjarak sekitar 5.000 kilometer dari Madrid, ibu kota Spanyol. Mernissi dibesarkan di harem, yang merupakan istilah Maroko untuk rumah besar yang dimaksudkan untuk mengisolasi wanita dalam keluarga dari dunia luar. Mernissi secara luas dianggap sebagai wanita Muslim pertama di Timur Tengah yang membebaskan dirinya dan wanita lain dari ketakutan akan perbudakan sosial dan ketidaksetiaan.⁵

Mernissi dilahirkan dalam keluarga kelas menengah dan menghabiskan masa mudanya tenggelam dalam petualangan dan kesenangan, tinggal bersama 10 kerabat seusianya. Mernissi mulai belajar membaca Alquran bersama sepupunya Lala Tam ketika

⁵ Sofiana Khaerunnisa, *Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Mernissi*,(Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah,2017), h.15

dia berusia tiga tahun. Mernissi memiliki ingatan buruk karena tidak mendengarkan musik saat melantunkan ayat-ayat Alquran.

Mernissi kuliah di Universitas Muhammad V di Rabat setelah menyelesaikan sekolah menengahnya. Pelajari tentang masalah sosial dan politik. Mernissi kemudian pindah ke Paris dan bekerja sementara sebagai penulis. Kemudian menyelesaikan studi sarjananya di Amerika Serikat, mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang humanisme dari Brandeis College pada tahun 1973 dengan proposal berjudul *Sexe Ideologie et Islam*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai *Al-Jins Kahandasat Ijtima'iyat*. Selain itu, ia juga kerap berkeliling negara-negara Islam untuk mencari lokasi, seperti Turki, Kuwait, dan Mesir. Kisah-kisah dan kehidupannya dituliskan dalam sebuah buku, karena Mernissi dikenal sebagai seorang wanita yang berjasa dalam menulis buku, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

a. Pemikiran Terhadap Kesetaraan Gender

Sejarah panjang pergolakan politik dalam Islam telah melahirkan berbagai efek domino dalam perkembangan sejarah umat Islam di panggung sejarah dunia.⁶

Berbanding terbalik dengan pandangan perempuan di bawah umur, Mernissi menekankan bahwa Islam menghargai kecerdasan manusia sebagai topik yang memiliki potensi dan dampak yang bertahan sepanjang manusia hidup. Hal ini juga membantu umat Islam untuk belajar tentang sejarah Islam, yang ditandai dengan ketertarikan terhadap perempuan sebagai makhluk sejarah dan bukan objek sejarah. Perempuan telah memainkan peranan penting dalam kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam, menurut sumber ilmiah dan karya sejarah, tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga dalam ranah sosial, sosiologi, dan lainnya.

b. Pemikiran Tentang Hijab

Dalam istilah awam, jilbab berfungsi sebagai penutup atau pembatas. Mernissi menunjukkan bahwa pengertian istilah hijab mengandung tiga komponen yang saling terkait. Pengukuran utama adalah pengukuran visual, artinya segala sesuatu harus dijauhkan dari pandangan. Momen diukur secara spasial, terutama dengan pembagian yang menetapkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Larangan tersebut menyiratkan bahwa pengukuran ketiga adalah pengukuran moral.⁷ Ringkasnya, memandang hijab sebagai pembatas yang memisahkan perempuan dari masyarakat umum, penghalang untuk memasuki dunia politik atau berperan aktif di arena publik⁸

⁶ Subehan Khalik "Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah dan Ahmadiyah)" *Jurnal al-daulah*, 4, No.1(2015):213

⁷ Fatima Mernissi, *Women and Islam*, h.118

⁸ Indrus H.Al-kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an* (Bandung: Fokus Media,2007),h.20

2. Pengertian Kepemimpinan Politik Perempuan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang pemerintahannya diselenggarakan secara demokratis. Sistem pemerintahan dengan corak demokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang diselenggarakan untuk dan oleh Rakyat.⁹

Demokrasi adalah cara manusia mengatur dan mempertahankan eksistensi kedaulatannya yang bersifat humanistik dalam spektrum sosial yang sangat luas. Eksistensi yang bersifat humanistik tersebut merupakan sifat dasar manusia untuk bertahan, diakui, dan berkontribusi bagi lingkungan sosialnya. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi menjadi dasar dalam bernegara . *pertama*, hampir seluruh negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tinggi.¹⁰

Politik adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Menurut Al-Mawardi, Konsep Politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Keterlibatan umat Islam dalam percaturan Politik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. ¹¹

Pembahasan tentang kepemimpinan, tak terlepas oleh konsep kepemimpinan itu sendiri, permasalahan mengenai kepemimpinan, serta mekanisme pemilihan seorang pemimpin itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya dilakukan peninjauan tentang apa definisi konsep pemimpin. Mendefinisikan konsep pemimpin dapat membantu dalam memahami dan melakukan pembahasan secara sistematis. Geoffrey G. Meredit, Kartini Katono menjelaskan kualitas pemimpin dapat diukur melalui beberapa, seperti memiliki gagasan-gagasan baru, berperan aktif didalam kehidupan bermasyarakat, belajar dari kesalahan ataupun kegagalan-kegagalan terdahulu, memiliki orientasi yang

⁹ Ayu Fajri Karunia, Sohrah”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti.”*Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, 3, no.2 (2022):250

¹⁰ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman ”Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai” *Siyasatuna*, 3, no.3 (2021): 538

¹¹ Albar, Hamsir “ Problematika Sukses Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar” *Siyasatuna*, 1, no.3 (2020):469

jelas, mendengarkan saran atau masukan, dan nasihat atau kritik sekalipun dari semua orang, dan selalu berupaya menghadirkan perubahan.¹²

Pemimpin atau pemerintah dalam Ilmu politik merupakan pelayan bagi kaumnya (warga-masyarakat). Pemimpin merupakan seseorang yang dibanggakan dan dihormati, sehingga patutlah berbuat baik serta mencintai masyarakatnya dan sifat tersebut merupakan suatu tindakan yang terpuji dalam agama Islam. Oleh sebabnya, pemimpin wajib aktif dalam memberikan pelayanan untuk segala aspek kehidupan masyarakatnya yang meliputi masalah ekonomi, keamanan, segala hak dan kewajibannya.¹³

Dalam al-Qur'an, selain berisi tentang hukum ilahi, juga syarat dengan nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil dan sebagainya. Dalam Islam, seorang pemimpin disebut khalifah. Kata khalifah berpokok dari kata *khalafah* yang artinya pengganti atau penerus, yaitu seseorang yang dipilih dan diangkat oleh rakyat guna menjadi pemimpin dalam suatu negara atau daerah.¹⁴

3. Syarat-Syarat Kepemimpinan Perempuan

Peran pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semuanya itu membenarkan kesimpulan bahwa pemimpin adalah teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan hasil yang baik dan demikian pula sebaliknya.¹⁵

Seorang pemimpin mungkin adalah orang yang menonjol dan sekaligus teladan yang terbuka. Keutamaan individu sebagai tujuan ajaran Islam sangat bergantung pada gaya dan ciri otoritasnya. Oleh karena itu, bakat seorang pionir harus mencakup semua sifat yang mungkin membuat administrasi tampak berharga bagi orang lain. Dalam pengertian Syariat Islam, syarat-syarat seorang pemimpin harus ditentukan sebagai berikut:

- a. Pemimpin harus menjadi individu yang dapat dipercaya. Kepercayaan berkaitan dengan beberapa hal, salah satunya adalah kebijaksanaan. Keadilan yang diusulkan tidak berlaku untuk kelompok, kolektif, atau umat Islam, tetapi untuk semua orang dan bahkan semua makhluk.

¹² Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Siyasatuna*, 2, no.2 (2021):387

¹³ Sri Windasari, St, Halimang “Kepemimpinan Kepala Desa Lempagang Kabupaten Gowa dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah”, *Siyasatuna*, 3, no.1 (2022):188

¹⁴ Alda Muchtar, Subehan Khalik “Tanggungjawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Faktor Yang Mempengaruhinya” *Siyasatuna*, 2, no.3(2021):614-615

¹⁵ M. Thahir Maloko” Etika Politik dalam Islam” *Jurnal al-daulah*, 1, No.2(2013)

- b. Pemimpin harus menerima, berkomitmen, dan melaksanakan tindakan luar biasa; mereka tidak boleh keluar jalur, fasiq, kasar, atau lalai terhadap petunjuk dan batasan Allah SWT. Pelopor yang melakukan kesalahan akan dicabut kekuasaannya.
 - c. Mampu menjalankan struktur wewenang sesuai dengan kewenangan dan kewenangannya. Di sisi lain, negara dan tatanan sosial akan hancur jika didorong oleh individu yang tidak terlatih. “Jika ada sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang bukan master, tunggulah sampai suatu saat benda itu hancur,” kata God’s Hail Conveyor.
 - d. Terus menaati hukum yang diberikan Tuhan.
 - e. Nabi berpesan untuk tidak meminta atau meminta suatu jabatan tertentu. Faktanya, kami tidak akan mengizinkan posisi itu kepada seseorang yang memintanya, atau kepada seseorang yang terdorong untuk meyakinkannya.
- Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pandangan beberapa elit agama yang cenderung tidak memberikan peluang bagi perempuan dalam aktifitas ranah politik, memberikan efek dimana pemahaman-pemahaman keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan termasuk hak-hak politiknya telah diserap masyarakat dan semakin meminggirkan kaum perempuan.¹⁶

4. Bentuk Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi

Wacana kepemimpinan perempuan menjadi polemik dan pro-kontra dikalangan mufassir. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis secara tekstual mengutamakan laki-laki menjadi pemimpin.¹⁷

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada perempuan yang masuk dalam lingkaran terbuka, karena sejarah kedua khalifah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hingga masa Tata Tertib telah menunjukkan sebagian kehadiran kewibawaan perempuan. Seperti yang diinginkan para tokoh muslim asal Maroko khususnya Fatima Mernissi yang pada umumnya membutuhkan keseragaman dan kesetaraan, berikut beberapa bagian perempuan yang bisa dilihat, seperti:

- a. Peran perempuan sebagai masyarakat

¹⁶ Nila Sastrawati”Relasi Gender dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai pada Partai Islam” *Jurnal al-daulah*,1,No.2(2013):90

¹⁷ Halimah B “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir” *Jurnal al-daulah*,7,No.1(2018):51

Perempuan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri; wanita tidak dimaksudkan untuk memuaskan atau melayani orang lain. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dalam hidupnya sebagai titik impas dengan makhluk hidup. Perempuan terpinggirkan dalam sistem kapitalis karena bakat, kompetensi, dan kapasitas mereka untuk bersaing.

b. Peran perempuan sebagai anggota keluarga

Meskipun keluarga mempunyai komitmen yang baik terhadap tatanan sosial, salah satu kapasitas keluarga adalah berfungsi sebagai mekanisme yang menunjukkan hubungan kontrol. Hubungan dalam keluarga mengungkapkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang lebih luas. Menurut pandangan Marxian, keluarga berfungsi sebagai penghubung pengendalian anggaran dalam masyarakat dengan membentuk dan mensosialisasikan generasi muda profesional sebagai tenaga kerja berdasarkan pembelajaran bersama. Keluarga dipandang sebagai mekanisme yang menghasilkan struktur kendali dunia moneter.

c. Peran perempuan sebagai warga negara

Dalam pengantarnya, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa realita permasalahan seksual yang sering terjadi di keluarga, komunitas, dan negara dengan perjumpaan yang berbeda dan bergeser yang dialami perempuan khususnya di tempat kerja, kesenjangan dan disparitas orientasi seksual berujung pada kekejaman fisik dan kekejaman mental, serta pelecehan seksual dan merendahkan kehormatan perempuan. Fleksibilitas politik salah satunya adalah peluang moneter, Oleh karena itu, perempuan harus mampu menunjukkan kepandaian berpolitik melalui aktivitas finansial seperti pekerjaan.

Modalitas dalam politik, Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai sekumpulan nilai dan informal dan norma yang menyebar diantara kelompok yang memungkinkan kerjasama terjadi antara mereka. Kerjasama tersebut terjadi apabila antar anggota kelompok masyarakat tersebut memenuhi apa yang diharapkan antar mereka bahwa lainnya akan bertingkah laku, dapat diandalkan dan memiliki kejujuran.¹⁸

¹⁸ Nila Sastrawati "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten luwu Utara" *Jurnal al-daulah*,6,No.2(2017):280

KESIMPULAN

Fatima Mernissi sebagai tokoh feminisme Islam memiliki pemikiran bahwa seorang perempuan dapat menjadi pemimpin pada dunia politik. Fatima Mernissi sangat menentang budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Karena dalam pandangannya, apa yang selama ini ada dalam sistem patriarki, yakni ketidakadilan, diskriminasi, pengasingan dan domestifikasi perempuan hanyalah penafsiran para ulama yang konon mempunyai otoritas dalam penafsiran teks-teks agama. Memperjuangkan kaum perempuan agar memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki, terkhusus pada bidang sosial dan politik. Mernissi menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya bersifat biologis, dan Islam mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam politik dan menjadi pemimpin politik dengan cara yang sama seperti laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ayu Fajri Karunia, Sohrah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah*, 3, no.2 (2022)
- Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai" *Siyasatuna*, 3, no.3 (2021)
- Albar, Hamsir "Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar" *Siyasatuna*, 1, no.3 (2020)
- Alda Muchtar, Subehan Khalik "Tanggungjawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Faktor Yang Mempengaruhinya" *Siyasatuna*, 2, no.3 (2021)
- Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir" *Jurnal al-daulah*, 7, No.1 (2018)
- Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna*, 2, no.2 (2021)
- M. Thahir Maloko, "Etika Politik dalam Islam" *Jurnal al-daulah*, 1, No.2 (2013)
- Nur Azzah Fadila, Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 3, no. 2 (2022)
- Nila Sastrawati, "Relasi Gender dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai Pada Partai Islam" *Jurnal al-daulah*, 1, No.2 (2013)
- Nila Sastrawati, "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara" *Jurnal al-daulah*, 6, No.2 (2017)
- Sri Windasari, St, Halimang "Kepemimpinan Kepala Desa Lempagang Kabupaten Gowa dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah", *Siyasatuna*, 3, no.1 (2022)

Subehan Khalik “Pemetaan Umat Islam (Sunni,Syiah dan Ahmadiyah)” Jurnal al-daulah, 4, No.1 (2015)

Buku

Fatima Mernissi, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry (Basil Blackwell: Oxford,1991)

Indrus H.Al-kaff, Kamus Praktek Al-Qur’an, Bandung : Fokus Media, 2007.

Muhammad Rusydi “ Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran feminisme Fatima Mernissi)” Jurnal an-nisa 7, No.2, 2012.

Sofiana Khaerunnisa, Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Mernissi, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah,2017.